

NOMOR J. SAMUDRA	JANGKAI ANTAR PULAU	WAKTU PERJALANAN	KETERANGAN LEBER
SETUP RABU JULAI 04, 11, 18, DAN 25 APRIL 2010	BELAKANG PADANG 1. KANTON KILIRANAN TERANGI SARI 1	BARU 09.00 - 14.00 WIB DUNAMAT 12.00 - 13.00 WIB	
SETUP SELASA	POK SAIPOL PP TERANGI KERTANG PULAU BALANG	09.30 S/D 14.30 WIB	

HARUS SIAP SAAT WAKTU SAMPAI TERANGI TERANGI KERTANG PULAU BALANG

DI JANGKAI ANTAR PULAU BELAKANG PADANG ***DI JANGKAI ANTAR PULAU BELAKANG PADANG***
 MELAKUKAN PELAYANAN SAMPAI PERANGKAP 08 JANGKAI ANTAR PULAU BELAKANG PADANG TERANGI KERTANG PULAU BALANG
 MELAKUKAN PELAYANAN SAMPAI PERANGKAP 08 JANGKAI ANTAR PULAU BELAKANG PADANG TERANGI KERTANG PULAU BALANG

TERAS

Utang RSUD Capai Rp 19 Miliar

BATAM KOTA (BP) - Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF) Kota Batam kesulitan melunasi utang kepada 34 vendor yang mencapai Rp 19 miliar. Namun, RSUD tetap berkomitmen untuk membayar utang sejak 2014 itu, dengan mencicil dalam tiga tahap.

"Kita akan cicil. Minggu lalu sudah dilakukan pembayaran pertama.



F. DALIL HARAHAP/BATAM POS
Ani Dewiyana

■ Baca **UTANG...** Hal 13

Pemko Akan Hapus Denda PBB-P2

Segera Siapkan Regulasi Kejar Piutang

BATAM (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menghapus denda Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Saat ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam tengah mempersiapkan regulasinya.

Kepala BP2RD Batam Raja Azmansyah menyebutkan rencana penghapusan denda PBB-P2 untuk kurun waktu tahun 1994 hingga 2010. Kebijakan tersebut untuk mempermudah pemerintah menjerang piutang dari jenis pajak tersebut.

"Kami ingin merangsang masyarakat untuk menggali piutang pajak. Ini sama yang



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

Raja Azmansyah

dilakukan di Bintan," kata Raja, Rabu (25/4).

Dikatakannya, meski denda dihapus tapi pokok piutang tetap akan ditagih dan tetap tercatat sebagai piutang Pemko Batam. Selain itu, insentif denda pun akan beragam.

■ Baca **PEMKO...** Hal 13

Pemko Akan Hapus Denda PBB-P2

Sambungan dari hal 9

Ada denda yang dihapus penuh, tapi dalam beberapa kasus hanya akan diberi potongan pembayaran.

"Intinya, pokok tetap kami tagih. Tapi dendanya nanti ada yang hanya didiskon 25 persen, 50 persen, 75 persen hingga 100 persen," paparnya.

Terkait rencana penghapusan denda PBB-P2, Raja mengaku belum mendapat gambaran nilai piutang yang akan hilang. Raja juga mengaku tidak hafal total pitungan dari denda, termasuk besaran piutang PBB-P2.

Namun pada Oktober 2017 lalu, Raja pernah menyampaikan bahwa Pemko Batam memiliki piutang sebesar Rp 300 milliar dari PBB-P2. Jumlah piutang tersebut berasal dari kasus beberapa lahan yang *over lapping* atau tumpang tindih. Seperti lahan yang sudah dipecah, tapi lahan induk (sebelum dipecah) masih tercatat atau belum terhapus, sehingga tetap tercatat sebagai objek pajak.

"Iya ini (Rp 300 miliar) denda dan pokok. Tapi belum dipastikan karena ada juga yang tak jelas siapa penanggungjawabnya. Ini kami analisa dulu, di mana yang *double*," paparnya.

Soal penagihan pokok piutang PBB-P2, sambung Raja, pihaknya juga menargetkan Rp 30 miliar per tahun. Target piutang ini juga termasuk dalam target pendapatan PBB-P2 tahun berjalan. "Dari target piutang PBB-P2 tahun ini, baru 15 persen atau sekitar Rp 4 miliar yang berhasil ditagih," terangnya.

Senada disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurutnya rencana penghapusan tunggakan atau denda PBB-P2 masih dalam proses. Bahkan pihaknya akan menggelar rapat seperti apa rencana penghapusan tunggakan tersebut. "Rencana penghapusan itu masih proses di Dispenda (BP2RD, red). Namun untuk teknisnya kami rapat dulu," terang Rudi di Bengkong, kemarin.

Menurut dia, rencana penghapusan denda PBB-P2 agar tak adanya wajib pajak yang menunggak lagi. "Saya belum bisa pastikan, kalau menurut aturan dihapus semua, ya kami hapus semua," tegasnya.

Perbaikan Data Wajib Pajak selesai Satu Jam

Raja Azmanzyah menyebutkan, setiap hari ada lima orang membuat laporan perbaikan data PBB. Sebagian besar karena kesalahan data. Nama wajib pajak tidak sesuai alamat. Begitu juga tipe dan luas lahan tidak cocok, sehingga harus perbaikan.

Sejauh ini, lanjut dia, ketika ada data yang keliru dan tidak sesuai bisa segera melapor ke BP2RD. Proses perbaikan data juga tidak memakan waktu lama. Raja mengklaim perbaikan kekeliruan data bisa diselesaikan dalam waktu satu jam. "Pokoknya ketika ada perubahan, kita perbaiki. Asal ada data pembanding, kalau rumah lewat sertifikat dan AJB," terang dia.

Selain itu, saat ini BP2RD juga sudah membuka layanan tunggu. Modelnya seperti kantor pelayanan di masyarakat. Ketika ada laporan perbaikan data, masyarakat bisa langsung melaporkan ke layanan tersebut, tanpa harus datang ke kantor BP2RD. "Kalau sekarang bisa lewat SMS atau WA ke 082172756500 dulu," papar Raja.

Distribusikan 11 Ribu SPPT PBB-P2

Kelurahan Tanjungriau mulai mendistribusikan 11 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) milik warga. "Kami sudah jalan dari tiga hari lalu," kata Lurah Tanjungriau Salmadi, kemarin.

Pendistribusian SPPT PBB-P2 tersebut untuk memberi

tau warga agar segera membayar tagihan PBB mereka. Ia menargetkan surat sampai ke tangan warga paling lambat minggu ini.

Salmadi menjelaskan surat diantar langsung petugas ke rumah-rumah warga. Sebelumnya pihaknya juga melibatkan perangkat RT/RW untuk sosialisasi kepada warga terkait pembayaran PBB ini. "Kami sangat berharap seluruh warga Tanjungriau tidak ada yang menunggak PBB," harapnya.

Dia menyebutkan, saat ini wilayah Tanjungriau mengalami peningkatan pembangunan perumahan. Untuk itu, beberapa SPT PBB-P2 diserahkan kepada developer rumah tersebut. Salmadi mengimbau warga yang belum menerima SPT PBB-P2 bisa langsung mendatangi kantor lurah. Sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh lurah diminta untuk membantu pemerintah dalam mendistribusikan surat pemberitahuan tersebut.

Sementara itu, Raja Azmanzyah mengatakan ada 304.134 SPPT PBB-P2 yang didistribusikan ke seluruh wilayah Kota Batam. Adapun target PBB-P2 tahun ini sebesar Rp 158 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 131 miliar. "Untuk pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan di bank-bank yang sudah bekerjasama. Bank Riau Kepri, BTN, BRI, dan BJB," sebut Raja. (yui/she/rng/gas/adi)

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan Direksi PT. RESINTECH INDOMAS yang berkedudukan di Kota Batam, telah menonaktifkan BENNY KISIONG selaku Manager PT. RESINTECH INDOMAS terhitung sejak tanggal 17 April 2018.

Sehubungan dengan penonaktifan BENNY KISIONG tersebut, terhitung sejak tanggal 17 April 2018, BENNY KISIONG tidak berhak bertindak untuk dan atas nama PT. RESINTECH INDOMAS, oleh karena itu diberitahukan kepada khalayak ramai untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun juga dengan BENNY KISIONG yang mengatasnamakan PT. RESINTECH INDOMAS.

Tertanda,
Direksi
PT. RESINTECH INDOMAS

RUMAH SAKIT

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

PENGUMUMAN

UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN & MENGANTISIPASI MENINGKATNYA RUJUKAN DARI DAERAH KEPULAUAN, MAKA RSBP BATAM (RS OTORITA BATAM SEKUPANG) MEMBUKA PENDAFTARAN PASIEN BPJS SAMPAI DENGAN PKL.13.30 WIB UNTUK POLIKLINIK SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYAKIT DALAM
2. BEDAH (UMUM, SARAF ONKOLOGI, UROLOGI)
3. ANAK
4. KEBIDANAN & KANDUNGAN
5. JANTUNG
6. ORTHOPEDI

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI :
CUSTOMER SERVICE RSB
(0778) - 321121 EXT.443
HP : 0853 1863 8838
(SDRI. ERRY)

Utang RSUD Capai Rp 19 Miliar

Sambungan dari hal 9

Tapi saya kurang tahu berapa total yang sudah dibayarkan," kata Direktur RSUD-EF drg Ani Dewiana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Batam, Rabu (25/4).

Ia mengatakan kebanyakan utang itu untuk obat. Kemudian untuk jasa pelayanan medis dan alat tulis kantor. "Untuk obat saja mencapai Rp 7 miliar. Belum lagi untuk ATK (alat tulis kantor) dan sebagainya. Jadi, sangat banyak itemnya," ungkapnya.

Untuk mengembalikan utang itu, RSUD mendapatkan uang dari penghasilan rumah sakit berplat merah tersebut. Tentunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, meski ada utang, pasokan obat sudah normal. Semua vendor tetap mau bekerjasama setelah mendapat penjelasan dari pihak RSUD.

Ani mengatakan, saat ini pihak RSUD terus melakukan

evaluasi dan perbaikan internal. Termasuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pelayanan. Di mana RSUD menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan obat. Sekitar Rp 7 miliar adalah obat habis pakai. "Sekarang juga kita lakukan perbaikan pelayanan dengan pendaftaran via *online*. Jadi, tidak perlu lagi datang dan antre di rumah sakit," ujarnya.

Sementara itu, untuk pengadaan obat sendiri diakui Ani juga sudah menggunakan *e-katalog*. "Sesuai arahan, kita sudah *e-katalog*. Mei ini sudah mulai berjalan. Jadi kekosongan obat sudah bisa kami minimalisir," terangnya.

Hanya saja, lanjut dia, permasalahan di RSUD saat ini yakni masih adanya sejumlah alat kesehatan yang rusak. "Harusnya perbaikan bisa cepat, tapi karena diperbaiki ke Jakarta sehingga butuh waktu lama. Tapi tetap kita prioritaskan," ujarnya. "Sedangkan untuk alat-alat fisio-

therapy, alat operasi, dan radiologi alhamdulillah sudah berfungsi semua," lanjut Ani.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan permasalahan di RSUD ini sudah sejak 10 tahun lalu berlangsung. Ia berharap dengan pimpinan RSUD yang baru, pelayanan akan lebih baik. Sebab, kata dia, selama ini ada banyak kasus yang terjadi di RSUD, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan RSUD.

"Kalau sampai ada temuan dari BPK berarti ada yang kurang bagus. Tapi saya berharap ke depan perbaikan terus ditingkatkan," harapnya.

Ia juga berharap kepada pimpinan RSUD agar memperhatikan kesejahteraan karyawan atau pegawai. Karena, jika pegawai tidak sejahtera maka pelayanan pastinya akan terganggu. "Jadi, di samping memperhatikan laba, pelayanan juga paling utama. Indika-

tor pelayanan dikatakan bagus kalau memang di pelayanan di rumah sakitnya bagus," ucapnya.

Diakui Rindo, masalah di RSUD sekarang sudah sangat susah untuk dipulihkan. Untuk itu, ia mengusulkan agar beban yang ada di RSUD dibagi kepada pihak lain. Dengan demikian, masalah di RSUD akan lebih mudah teratasi.

Gaji Honorer Dibayar di APBD Perubahan

Selain utang ke vendor, RSUD Embung Fatimah juga akan segera melunasi tunggakan gaji tenaga honorer. Direktur RSUD Embung Fatimah Ani Dewiyana mengatakan, gaji sekitar 400 tenaga honorer yang tertunggak bulan Desember 2017 lalu sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

"Nanti di (APBD) Perubahan. Kita usulkan dibayar untuk semua tenaga honorer RSUD," kata Ani di DPRD Batam, kemarin. (ian/rng)

Keuangan Diperketat untuk Rawat Kendaraan Dinas

BATAM KOTA (BP)- Pengawasan penggunaan keuangan pemerintah atas pemeriksaan kegiatan perawatan kendaraan dinas akan diperketat. Hal ini dilakukan seiring kebijakan penggunaan keuangan pemerintah yang juga diperketat.

"Kami sudah mulai di Dinas Bina Marga dan sekretariat," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin saat membuka Workshop Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Aula Kantor Wali Kota Batam, Rabu (25/4).

Ia mengatakan pengawasan akan berlaku untuk dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. "Ke depan di Dishub juga yang punya banyak kendaraan. Intinya kami per-



F. HUMAS PEMKO BATAM UNTUK BATAM POS

WORKSHOP Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Aula Kantor Wali Kota Batam, Rabu (25/4).

ketat," ujarnya.

Workshop Maturitas SPIP ini dilaksanakan tiga hari, sampai Jumat (27/4). Kegiat-

tan hari pertama diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hari kedua dan ketiga diikuti Sekretaris

SKPD, serta Kasubbag Program dan Perencanaan SKPD.

"Saya berharap kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Supaya bisa bekerja sesuai aturan, tidak bekerja dalam kegamangan dan kegalauan," kata Jefridin.

Pada *workshop* itu juga disampaikan pentingnya SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk keuangan. Ia minta peserta memanfaatkan momen ini untuk belajar dari narasumber yang kompeten yang dihadirkan.

Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, Panijo. "Manfaatkan ini, curi ilmu beliau. Beliau tidak

pelit dengan ilmu," ujarnya.

Kepala BPKP Kepri, Panijo mengatakan saat ini tiga pemerintahan daerah di Kepri sudah mendapat level tiga di SPIP. Ketiganya yaitu Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan Pemerintah Kabupaten Karimun. "Batam belum level 3. Kalau tidak telat kemarin, sudah kategori 3. Tapi berdasarkan hasil laporan pengawasan internal, beberapa SKPD sudah di level 3," kata Panijo.

Sementara Inspektur Inspektorat Pemko Batam, Heriman mengatakan *workshop* maturitas SPIP ini merupakan bagian dari rencana aksi KPK. Ia mengharapkan dukungan dari seluruh SKPD untuk melaksanakan SPIP ini. (adi)

DPRD Minta Tim Saber Pungli Turun

Antisipasi Calo Jelang PPDB

BATAM KOTA (BP) - Anggota Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari meminta tim saber pungli untuk turun menyebarkan personelnya jelang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Sebab, di saat itulah banyak bermunculan oknum yang meman-

faatkan PPDB untuk mengeruk keuntungan, bahkan untuk menaikkan popularitas para oknum politisi tertentu.

"Oknum-oknum ini tak hanya dilakukan mereka yang bereseragam saja, tapi banyak juga di luar pemerintahan seperti anggota ormas atau LSM," ujar

Riky, Rabu (25/4) siang.

Menurutnya praktik-praktik ini harus dicegah dan hanya tim saber pungli yang bisa menghentikannya. "Ini tantangan yang harus dijawab tim saber pungli untuk mengungkap praktik pungli di PPDB," terang Riky.

Selain itu, Riky juga menyay-

angkan setiap tahun Disdik Batam justru menyuarakan ke publik kalau daya tampung sekolah negeri selalu tak mencukupi. Belasan hingga puluhan ribu anak usia sekolah terancam tak tertampung.

"Faktanya kan tak ada di Batam ini anak tak sekolah. Semua bisa sekolah kok," ungkapnya.

Namun, konsekuensinya tentu saja banyak permasalahan seperti orangtua dimintai uang oleh oknum yang me-

masukkan sekolah, diminta bayar uang bangku, dan masih banyak lainnya. "Intinya memang anak bisa sekolah ke negeri meski para orangtua berdarah-darah mengeluarkan biaya," terang Riky.

Untuk itu, ia berharap agar sekolah swasta kali ini bisa membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan di Batam dengan menurunkan biaya pendaftaran masuk sekolah. (yui/une/gas)

Kaveling Tak Dibangun Segera Ditarik

Sambungan dari hal 9

maka harus dibangun," jelasnya. Dikatakan Imam, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan lewat *drone* di berbagai titik. Ia berharap semua pemilik kaveling segera membangun rumah sesuai peruntukannya. "Saya kurang tahu pasti berapa banyak yang sudah dialokasikan ke warga, tetapi semua akan kita data," ujarnya.

Dia menyebutkan tindakan tersebut dilakukan dalam rangka penataan lahan di Batam. Nantinya KSB yang ditarik tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan perumahan.

Batam mengevaluasi dan menarik KSB yang tidak kunjung dibangun. Sebab banyak KSB yang terlantar, padahal seharusnya bisa dialokasikan untuk perusahaan pengembang perumahan.

"KSB yang tidak dibangun itu bisa dialokasikan lagi kepada pengembang yang benar-benar mau dan bersedia melakukan pembangunan," katanya.

Menurut Achyar saat ini banyak KSB yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Padahal seharusnya KSB itu diberikan untuk warga yang belum memiliki rumah.

ti rugi sebesar Rp 15 juta per rumah sudah menjadi kesepakatan bersama BP Batam dan pengusaha.

"Ini tak perlu ditutup-tutupi. Maka sampaikan dulu, uang sekian, tanah sekian. Supaya semua tahu. Jangan ada dusta di antara kita," tutur Rudi.

Diakui Rudi, soal lahan kaveling memang belum mendapat kepastian titik dari BP Batam. "Karena belum jelas dari tetangga sebelah (BP Batam), lahan belum ditentukan mau pindah ke mana?" ucap dia.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menjamin ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan.

Seru dan Bikin Penasaran

Sambungan dari hal 9

Didominasi para remaja, keresahan akibat tak sabar menunggu bercampur dengan keriuhan suasana yang membahas masing-masing *hero*. Keadaan itu nyatanya tidak hanya meresahkan para penggemar, tapi juga pihak bioskop.

"Di sini (Cinema 21 BCS) penayangan awal pukul 12.00 WIB. Seharusnya kami buka setengah jam sebelum penayangan. Tapi melihat antusias penonton, kami buka dari pukul 11.00 WIB," kata Supervisor Cinema 21 BCS, Imam.

Ia menyebutkan dalam penayangan perdana pihaknya berhasil menjual 3.500 hingga 4.000 tiket. "Kami buka lima studio, *full* semua. Dua

studio untuk tiket *online* atau *booking*, dan tiga studio yang dibeli langsung di hari penayangan. Total sehari 20 kali tayang untuk film *Avengers*," jelasnya.

Antusias penonton tidak hanya dari kalangan anak-anak dan remaja, tapi juga para orang tua. Momen yang dinilai tepat karena sebagian pelajar yang tidak UN (ujian nasional) libur sekolah, membuat film ini dipadati pengunjung dari berbagai kalangan.

"Anak yang *ngebet* nonton. Karena semangatnya, saya sekeluarga juga ikut nonton. Suami sampai libur kerja," ungkap Carmen, salah satu orangtua yang mendampingi anaknya menonton *Avenger* di Cinema 21 BCS.

Dengan durasi film 150 me-

nit, respons dari para penonton pun beragam. Tapi, tak satupun memberikan respons negatif. Hanya rasa penasaran itu kembali muncul di adegan akhir (*after credit*) film.

"Seru. Seru banget, spektakuler. Tapi lagi-lagi *nge-gantung*," ucap Tia bersama sembilan rekan satu kampusnya.

Sepuluh mahasiswa Universitas Internasional Batam (UIB) ini mengakui keseruan tersebut muncul kala masing-masing *hero* hadir di sekuel yang sama. Setiap adegan *superhero* itupun punya peran berarti.

"Kagum sih, ada romantisnya, ada patah hatinya, dan ditutup penasaran karena belum tahu siapa satu *hero* yang berhasil melawan Thanos (musuh

itu," terang Kiki, satu-satunya pria yang nonton bareng di kelompok Tia tersebut.

Belum lagi, soal perselisihan antara Captain America dan Iron Man di *The Avengers* (sekuel sebelum *Infinity War*) yang masih terjadi di film ini. "Kirain Captain America sama Iron Man bakal baik, tapi nyatanya enggak. Huuffttt..." sambung teman Tia lainnya.

Menggantungnya *ending* cerita *Avengers: Infinity War* bakal membuat rasa penasaran akan kelanjutan film ini yang akan dirilis 2019 nanti. "Terpaksa *nunggu* tahun depan lagi. Tapi *gak* apa-apa, biar *superhero* Marvel ada filmnya terus. Intinya film yang sekarang menggelitik emosi banget. Haru," tutup Tia. (nji)

Utang RSUD Capai Rp 19 Miliar

... dan perbaikan inter-therapy, alat operasi, dan tor pelayanan dikatakan bag

Tertibkan Angkot Nakal

BATUAJI (BP) - Warga pengguna jalan di Batuaji dan Sagulung mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dan Satlantas Polresta Bareleng segera menertibkan angkutan umum atau angkutan kota (angkot) nakal, khususnya yang suka ugal-ugalan di jalan raya.

Desakan ini cukup beralasan, sebab dalam sehari ada saja kecelakaan lalu lintas akibat ulah angkot yang melaju ugal-ugalan itu.

"Selain kebut-kebutan, angkot di sini umumnya lampu rem atau seinnya banyak yang tak berfungsi. Kalau mau belok atau berhenti tak ada tanda buat pengendara di belakang," keluh Supriadi, warga Kaveling Nato, Sagulung.

Akibat sering dikeluhkan mengebut di jalan raya, beberapa kecelakaan juga kerap terjadi dengan melibatkan angkot.

Seperti, kecelakaan di Jalan Brigjen Katamsi, Tanjungcang, Selasa (24/4). Sebuah angkot menabrak truk trailer. Beruntung saat kecelakaan itu terjadi, angkot tersebut tak ada penumpang.

Sehari sebelumnya, kecelakaan serupa juga terjadi di depan perumahan Villa Mukakuning.

Sebuah angkot jenis Bimbar menabrak seorang wanita yang mengendarai sepeda motor matik. Akibat kecelakaan itu, wanita pemotor tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Tidak itu saja, sepekan yang lalu kecelakaan juga menimpa seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor Satria FU di jalan Seibinti tak jauh dari simpang Fanindo. Pemuda itu terpelanting dari sepeda motornya karena disenggol angkot Bimbar yang melaju kencang dari arah Seibinti ke simpang Fanindo.

Kejadian-kejadian itu membuat warga pengguna jalan di sana tak nyaman. Warga khawatir jika mereka yang akan jadi korban berikutnya jika angkot-angkot tersebut tak segera ditertibkan.

Warga berharap agar Dishub Kota Batam dan pihak Satlantas Polresta Bareleng segera mengambil tindakan tegas dengan turun menertibkan angkot yang suka ugal-ugalan tersebut. Pasalnya, razia ini pernah tercatat dilakukan di sekitar Temenggung Abdul Jamal, Mukakuning, namun belum berlanjut hingga ke Batuaji atau Sagulung.

"Jarang di sini ada razia angkot," ujar Reza, warga lainnya.

Pihak Dishub sendiri sebelumnya berjanji akan segera turun menertibkan angkot-angkot tersebut. Termasuk, angkot berkaca gelap. (eja)

Warnet Beroperasi Tak Terkendali

Dari Pagi ke Pagi, Ditutup Buka Lagi

EUSEBIUS SARA, Batuaji

MESKIPUN Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang batasan jam operasional warung internet (warnet), namun masih banyak juga yang melanggar aturan tersebut.

Bahkan, tak sedikit warnet yang tak mengantongi izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), namun leluasa bero-

operasi.

Contohnya di Batuaji. Beberapa warnet yang sebelumnya sudah ditertibkan karena tak mengantongi izin dan menyalahi jam operasional, malah kembali beroperasi. Kondisi ini kembali memantik keluhan dari masyarakat.

"Kadang mereka tak peduli siapa yang datang. Anak-anakpun dibiarkan main walau di jam sekolah atau tengah malam," keluh Hendrik, warga Genta I Batuaji, kemarin.

Warnet di deretan Ruko Li-

manda, Kelurahan Buliang, contohnya. Menurut Hendrik, warnet itu sudah berulang kali didatangi petugas dari Kecamatan Batuaji ataupun dari DPM-PTSP. Namun, warnet tersebut tetap beroperasi.

"Ada empat atau lima titik warnet di situ. Sudah ditegur tetap bandel mereka. Padahal sudah cukup resah masyarakat di sekitar sini karena buka dari pagi sampai pagi lagi," katanya.

Senada disampaikan Roy, warga Tanjungcang. Warnet

yang ada di ruko yang berderet di sepanjang jalan Brigjen Katamso mulai dari Fanindo sampai di depan PT Hyundai terus beroperasi bebas hingga larut malam.

Warnet-warnet tersebut umumnya sudah diperingatkan petugas dari kecamatan Batuaji saat dirazia, namun masih bandel. Saat razia petugas menemukan banyak siswa SMP dan murid SD bermain games online saat jam pelajaran di sekolah masih berlangsung.

"Tapi begitu saja. Cuma diperingati, besoknya buka lagi," ujar Roy.

Pantauan *Batam Pos*, warnet yang telah menyebar hingga ke lingkungan perumahan masih bebas beroperasi hingga larut malam. Warnet-warnet yang menyalahi aturan itu umumnya warnet yang hanya mengantongi surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari kecamatan. Padahal, SKDU itu bukan surat izin namun hanya surat pengantar untuk mengurus izin ke DPM PTSP.

Kepala DPM-PTSP Kota Batam Gustian Riau sebelumnya mengaku, warnet yang beroperasi tanpa batas itu sudah dipastikan tak memiliki izin

operasi. Karena tak terdaftar dan tak mengurus izin. Pihak DPM-PTSP kesulitan untuk mengawasi ataupun memantau keberadaan warnet itu.

"Di Batuaji sudah sekitar 15 warnet yang kami tutup. Cuma itu tadi, karena tak tahu dimana lokasinya karena memang belum memiliki izin tentu tidak bisa kami tutup serentak semuanya," ujar Gustian.

Namun, ke depannya penertiban akan terus dilakukan sehingga warnet-warnet yang beroperasi tanpa izin segera mengurus perizinan yang sah agar mudah diawasi. ***



F. CECEP MULYANA, BATAM POS
Gustian Riau

Polisi Digaji untuk

Mengontrol